



RANWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda



WALI KOTA SAMARINDA

Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
5. Camat Se-Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/2935/300.01

Tentang

Penyusunan Rancangan Awal

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Samarinda Tahun 2027**

Dalam rangka proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala BAPPERIDA mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 memperhatikan dan mendukung prioritas pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Tata cara penyusunan dokumen Ranwal RKPD dan Renja PD Tahun 2027 mempedomani sistematika, substansi, tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Renja PD Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD-RI pada tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> yang pengaturan teknisnya dikoordinasikan oleh BAPPERIDA Kota Samarinda;
5. Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, agar memperhatikan agenda rangkaian penyusunan RKPD dan Renja serta batas waktu penyampaian Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk di verifikasi. Agenda Penyusunan RKPD dan Renja, sistematika penyusunan Renja sebagaimana terlampir.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsrE.

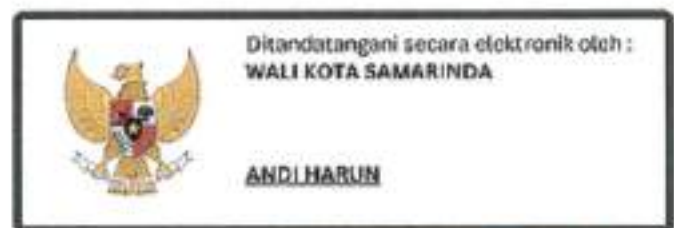


Balai
Sertifikasi
Elektronik

6. Dokumen Rancangan Awal RKPD dan Renja PD Tahun 2027 diselesaikan paling lambat minggu ke-4 Januari 2026 untuk selanjutnya dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran dan masukan penyempurnaan dalam Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
7. Koordinasi mengenai penyusunan dokumen Ranwal Renja PD Tahun 2027 melalui Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda.
8. Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 dan Renja PD Tahun 2027 dihimbau untuk menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 218CA-2026-16-69-000-1





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Nomor 78 Lantai III Telp. (0541) 743595

Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112



<http://disnaker.samarindakota.go.id>

Email: disnaker.smd@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Nomor: 500.15.2/006/ 100.04

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

TAHUN 2027

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 sebagai berikut:
1. Ketua Tim : Kepala Dinas Tenaga Kerja
 2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
 3. Anggota : - Kepala Sub Bag. Perencanaan Program dan Keuangan
- Staff
- Kedua : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 di masing-masing Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi:
- a. Harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
 - b. Perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketahui oleh yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat Daerah.
 - c. Dibuat sesederhana mungkin bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor

- Keempat : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggungjaab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SAMARINDA,


HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP, MH
NIP. 19751212 199501 2 001

Lampiran :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA TENAGA
 KERJA KOTA SAMARINDA
 Nomor : 500.15.2/006/ 100.04
 Tanggal : 05 Januari 2025
 Tentang Tim Pembentukan Tim Penyusun Rencana
 Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Daftar Tim Pelaksana:

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Yuyum Puspitaningrum, AP. MH NIP. 19751212 199501 2 001	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sofyan Ady Wijaya, S.Sos, M.Si NIP. 19690722 200012 1 001	Sekretaris	Sekretaris
3.	Dwi Eva Yusita, S.StPi NIP. 19830824 201101 2 003	Kepala Sub Bag. Perencanaan Program dan Keuangan	Anggota
4.	Wahyu Dwi Fuji Lestari, SP NIP. 19870328 202521 2 013	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	Hendra Wisnu Wardhana, SE NIP. 19831025 202521 1 019	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Barnas Sujana, S.IP NIP. 19881109 202521 1 110	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA SAMARINDA,



Hj. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP, MH
 NIP. 19751212 199501 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayatnya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2027, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025-2029, kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah

"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"
-Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul-

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 masih banyak kekurangan, namun demikian kami berharap dengan penyusunan Ranwal Renja 2027 ini dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada Tahun 2027.

Akhirnya atas nama Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Ranwal Renja Tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda



HJ. YUYUN PUSPITANINGRUM, AP, MH
Pembina TK.I IV/b
NIP. 197512121995012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja ...	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA	
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja	66
BAB V. PENUTUP	
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2027 merupakan rencana kerja tahun penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2025-2029. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2027.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 didasarkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Disisi lain Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, dan akan dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana APBD.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang Penetapan Renstra PD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 tanggal 28 September 2021.
24. Surat Edaran Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
25. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.2/0955/300.01 tentang Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kota Samarinda dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
26. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor : 0007.7.2.4/2935/300.01 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Samarinda Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2027 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2027.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh dinas tenaga kerja kota samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan penetapan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Penetapan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Penetapan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2024 Dan Capaian Renja Disnaker

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah, provinsi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2027

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja beserta target capaian kinerja OPD pada tahun 2027 beserta pagu indikatif anggarannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Realisasi Rutin Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 Anggaran keuangan untuk belanja rutin Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar **Rp. 10.321.799.959,00** (*Sepuluh milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) namun terjadi perubahan pada APBD-P 2025 menjadi **Rp. 9.467.525.763,00** (*Sembilan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*), dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2..1 Realisasi Belanja Rutin DISNAKER Kota Samarinda Tahun 2025

No	Kegiatan	Dana	Perubahan 2025	Realisasi s/d Triwulan IV	%	%
				2025	Rp	K
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.720.000,00	108138000	107.863.750	99,75	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.507.000,00	42.521.000,00	41.963.350,00	98,69	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.507.000,00	40.381.000,00	40.140.067,00	99,4	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.315.908.458,00	5.703.870.641,00	5.560.455.517,00	97,49	100,00
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.035.521.661,00	1.109.355.000	987.233.533,00	88,99	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.493.000,00	31.243.375,00	30.855.810,00	98,76	100,00
Administrasi Umum Perangkat daerah						
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.585.000,00	52.585.000,00	52.495.000,00	99,83	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	91.000.000,00	90.944.000,00	99,94	100,00

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.300,00	99,99	100,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	29.955.000	99,85	100,00
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	39.735.375,00	39.609.650,00	99,68	100,00
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	21.600.000,00	21.570.000,00	99,86	100,00
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	9.532.000,00	95,32	100,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.377.000,00	38.688.500,00	38.246.619,00	98,86	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.329.000,00	3.329.000,00	3.320.000,00	99,73	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	919.557.840,00	742.658.597,00	691.793.140,00	93,15	100,00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.200.000,00	89.144.025,00	86.680.000,00	97,24	100,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.570.000,00	204.570.000,00	204.570.000,00	100	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.000.000,00	176.370.000,00	167.222.464,00	94,61	100,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.100.000,00	71.606.250,00	57.173.846,00	79,84	100,00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.500.000,00	258.580.000,00	255.674.553,00	98,88	100,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.000.000,00	522.150.000,00	517.783.180,00	99,16	100,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	49.916.350,00	99,83	100,00
	Jumlah	10.321.799.958,00	9.467.525.763,00	9.114.997.129,00	95,28	100,00

Anggaran Belanja Kegiatan Dinas Tenaga Kota Samarinda sebesar **Rp. 6.675.400.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** namun mengalami Perubahan menjadi **Rp. 5.054.551.625,00 (Lima milyar lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Kegiatan Disnaker Kota Samarinda Tahun 2025

No	Kegiatan	Dana	Perubahan 2025	Realisasi s/d Triwulan IV 2025	% (Rp)	% (K)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	136.399.000,00	119.597.000,00	111.377.499,00	93,13	100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	123.867.000,00	74.131.000,00	70.428.002,00	95	100
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	35.984.343,00	99,96	100
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	666.733.000	606.747.375,00	604.499.900,00	99,63	100
Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Kerja Swasta						
5	Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Kerja Swasta	86.410.000,00	49.535.000,00	47.358.050,00	95,61	150
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						
6	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	178.635.000,00	104.642.375,00	86.736.666,00	82,89	100
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
7	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	125.648.000,00	73.054.125,00	71.447.660,00	97,8	100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
8	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	60.000.000,00	48.152.500,00	35.960.350,00	74,68	100
9	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100.000.000,00	99.489.250,00	93.518.640,00	94	100
10	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	78.018.000,00	72.523.500,00	71.973.209,00	99,24	100
11	Perfusan Kesempatan Kerja	110.000.000,00	100.266.250,00	98.497.866,00	98,24	100

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
12	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000,00	50.000.000,00	49.900.000,00	99,8	100
13	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	91.691.000,00	72.767.875,00	72.339.024,00	99,41	134
14	Job Fair/Bursa Kerja	163.058.000,00	157.607.500,00	153.979.690,00	97,7	118,67
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
15	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	91.404.000,00	51.820.125,00	48.475.958,00	93,55	100
16	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	83.171.000,00	56.594.000,00	54.168.584,00	95,71	100
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
17	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.339.000,00	126.686.000,00	113.800.295,00	89,83	103,75
18	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.341.000,00	82.423.500,00	78.822.400	95,63	100
19	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	46.300.000,00	21.753.500,00	19.258.150,00	88,53	100
20	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	191.443.000,00	138.826.375,00	130.848.676,00	94,25	100
21	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.036.216.000,00	2.911.934.375,00	2.902.632.800,00	99,68	77,59
Jumlah		6.675.400.000,00	5.054.551.625,00	4.952.007.762,00	97,97	104,00

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Target 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
						Target Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Realisasi Perubahan Renja Disnaker Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
	2														
	2	07													
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai AKIP	91 Persen	87,85 Persen	88.00 Indeks	88.93	101	88.5 80	276,2	3,04
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70Persen	66,50 Persen	79.00 AKIP	79	100	100 %	198,5	2,84
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Pperencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	17 Dokumen	17	100	7 DOkumen	29	4,14
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3	100	3 Laporan	2	2
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4	100	4 Laporan	2	2

	2	07	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	-	0 Berita Acara	0	-	-	2	1
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100%	100	100%	72	3
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang /bulan	34 Orang/ Bulan	41 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan	100	45 Orang/Bulan	114	2,85
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Orang/Bulan	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Dokumen	42	3
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	3
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian			-	-	-	100%		
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakal Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakal Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	40 Paket		
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	8 Orang		
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			-	-	-	8 Orang		
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum	12 Laporan	12 Bulan	100 %	100 %	100	100%	36	3

							Perangkat Daerah Yang Terpenuhi								
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	9	3
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	10	2
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3	3
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100	5 paket	18	3,6
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	15	3
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	596 Dokumen	596 Dokumen	100	600 Dokumen	150	3
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	45	3
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	5 Laporan	60	3
	2	07				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					100 Dokumen			
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	10 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	100	100%	30	3
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	12 laporan	30	3

2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108	3
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	51	2,83
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	3
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	30 Laporan	30 Laporan	100 %	100 %	100	100%	72	2,4
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	58	2,42
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	2 Unit	13	2,6
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100	-	90	3
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	3
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	19	2,71
2	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	64,29%	64,29%	100	-	3	3

	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	3	3
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	10 Orang	3	3
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	28 Persen	27 Persen	4 Persen	4 Persen	5,6%	7,2%	81	2,89
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	6 Paket	10	2,5
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	25 Lembaga	25 Lembaga	25Lembaga	25Lembaga	100	30 Lembaga	52	2,08
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	31 Unit	9 Unit	9 Unit	155	20 Unit	55	2,75
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	64 Orang	64 Orang	80 Orang	80 Orang	100	112 Orang	176	2,75
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan	14 Lembaga	14 Lembaga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 Kegiatan	28	2
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	14 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	100	30 Lembaga	34	1,7
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap	30Perizinan	30 Perizinan	10 LPK	10 LPK	100	10 LPK	60	2
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	30 Perizinan	13 Perizinan	13 Perizinan	100	30 Perizinan	60	2
	2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina						50 Perusahaan		

	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas						50 Perusahaan		
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	10 Perusahaan	15 Perusahaan	5 Dokumen	5 Dokumen	150	7 Dokumen	25	2,5
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	7 Dokumen	17	2,43
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan	5,90 Persen		16,17 Persen	28,42 Persen	175,76	16,50%		
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	375Orang	375 Orang	2000 Orang	2178 Orang	108,9	2000 Orang	1125	3
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	3 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	63	2,1
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	300 Orang	700 Orang	700 Orang	75	500 Orang	800	1,6
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16 Orang	41 Orang	18 Orang	18 Orang	256,25	20 Orang	57	3,56
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	30 Orang	45 Orang	45 Orang	136,36	45 Orang	150	3,75
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun	4 Media	4 Media	450 Dokumen	450 Dokumen	100	500 Dokumen	12	3
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	3	3

	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari Hub)	1000 Orang	900 Orang	2000 Orang	2178 Orang	100	2000 Orang	2700	2,7
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	150 Orang	150 Orang	178 Orang	100	150 Orang	522	1,74
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Hubungan Industri	4,8 Persen		90 Persen	111 Persen	123.33 Persen	91%		
							Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			90 Persen	78 Persen	86.67 Persen	91%		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	30 Perusahaan	50 Perusahaan	117 Perusahaan	234	50 Perusahaan	110	2,2
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	30 Perusahaan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	100	40 Perusahaan	70	1,75
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	40 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	120	3
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	40 Perkara	40 Perkara	100 Perkara	20	20	110 Perkara	120	3
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	40 Perkara	80 Perkara	83 Perkara	103.75	150 Perkara	120	3

						Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	60 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	100	110 Perkara	140	3,5
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	23	1,53
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	4	4
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70 Orang	70 Orang	19000 Orang	14743 Orang	77.59	19000 Orang/Bulan	210	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas terdiri atas

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan jaminan Sosial terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial dan transmigrasi
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dan membawahi kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
2. Penyusunan bahan Rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum

3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
4. Pengordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan dan Layanan informasi dan pengaduan
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan/retribusi
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
11. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
13. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedr (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat/pelanggan
15. Pengelolaan pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi
16. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu
17. Pengordinasian pengelolaan data, Pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan

20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya
3. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor
4. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas
5. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian
6. Mengkoordinir dan Menyusun bahan Kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas
8. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas
9. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, Pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas
10. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah

12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan /pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja) Dinas
3. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja)
4. Mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Individu dari seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
5. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas
6. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. mengkoordinir pengumpulan data dari seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas sebagai bahan dokumen dan pelaporan Dinas;
8. mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
9. mengkoordinir penyusunan pra RKA/RKA/RKA perubahan/DPA/DPPA Dinas;
10. menyusun laporan tahunan kinerja Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan
12. kegiatan Dinas;
13. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

14. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
15. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
16. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
18. melaksanakan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
19. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
20. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
21. menyusun neraca keuangan dinas;
22. mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
23. menyusun laporan keuangan dinas;
24. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
25. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemagangan;
4. Penyebarluasan informasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada Lembaga pelatihan kerja, asosiasi profesi, industri dan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
6. Pembinaan perizinan lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi profesi;
7. Penyediaan sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja
8. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
9. Pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat kota;
10. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. pelaksanaan penyusunan data pencari kerja dan data lowongan kerja;
3. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja;

4. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
5. pelaksanaan pemberian persetujuan pendirian Lembaga Bursa Kerja Khusus;
6. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / job fair;
7. pemberian fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
8. pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota;
10. penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
11. pelaksanaan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);
12. pemberian pelayanan kelengkapan dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
13. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketrasmigrasian;
14. pelaksanaan klarifikasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
15. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan jaminan Sosial terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional

Bidang Hubungan Industrial, syarat kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang hubungan industrial dan persyaratan

kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Pengkoordinasian pemberian pelayanan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Lembaga Kerja Sama Tripartit, program KB di perusahaan untuk pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
4. Pembuatan Perjanjian Kerja (PK); Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
5. Pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengupahan dan jaminan sosial;
6. Sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan serta monitoring upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP);
7. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Terdiri atas

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok berdasarkan sifat dan keahliannya, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	60	64,29	-	71,43	60	64,29	-	71,43	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	28	4	5,6	7,2	28	3,68	5,6	7,2	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	5,90	16,17	16,5	5,5	5,90	28,42	16,5	5,5	
4	Program Hubungan Industrial		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	51,34	90	91	92	51,34	111	91	92	
			Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	90	91	92	-	78	91	92	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	58	79	80	81	79	80	80	81	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	88	88,5	89	87,85	88,93	91	91,5	

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Isu-isu penting dalam Renja disusun berdasarkan beberapa sumber, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di kota Samarinda, bersumber dari permasalahan isu dalam rangka pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda prioritas pembangunan, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tenaga kerja lokal yang bersifat keahlian.
2. Belum optimalnya kualitas dan Kuantitas SDM.
3. Belum optimalnya penyampaian informasi kepada pencari kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan Kompetensi Pencari Kerja ;

1. Kurangnya Tenaga Instruktur dan Pengembangan lembaga pelatihan yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan;
2. Kurangnya pengembangan produktivitas pada perusahaan mikro, kecil dan menengah UMKM serta Wirausaha Baru;
3. Tingkatnya pengangguran terbuka yang cukup tinggi, ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan dan terbatasnya kesempatan kerja, tingkat pelaporan yang tidak akurat, serta banyaknya perusahaan yang tidak memahami dan menjalankan peraturan ketenagakerjaan menyebabkan banyaknya perselisihan perusahaan dan rendahnya/ kurangnya kesejahteraan pekerja, pekerja dan serikat buruh.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		81	9.725.686.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		88,5	9.725.686.000,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP		100	225000000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP		100	225000000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	100000000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	100000000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	75000000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	75000000
Evaluasi Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	50000000	Evaluasi Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	50000000
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100%	7485686000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100%	7.485.686.000
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji/ dan Tunjangan ASN	45	6435686000	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji/ dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	6.435.686.000
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	1000000000	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	1.000.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50000000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	50000000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Samarinda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian		100	150000000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian		100%	150.000.000
Sub Keg. Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	50000000	Pengadaan Pakalan Dinas beserta atribut Kelengkapan	Samarinda	Jumlah Paket pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	50.000.000
Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	50000000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	50.000.000
Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0
Sub Keg. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8	50000000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	8 Orang	50.000.000
Keg. Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		100	315.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		100%	315.000.000,00
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30000000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	30.000.000
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	25000000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	5 Paket	25.000.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	35000000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	35.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	30000000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	30000000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	30000000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	600 Dokumen	20000000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	600 Dokumen	20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	35000000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	35.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	75000000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	75.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	20000000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Arsip dinamis yang di arsipkan	100 Dokumen	20.000.000
Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30	15000000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	15.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100	50000000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100%	50.000.000
Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	50000000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP		100	1110000000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP		100%	1.110.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	10	10000000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	850000000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	850000000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18	50000000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	200000000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	200.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100	3900000000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	390.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	20	190000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	20 Unit	190.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	2	50000000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	2 Unit	50.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	50000000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	70000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	70.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7	30000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 Unit	30.000.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	71,43	100000000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		100.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi		2	100000000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.000.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Samarinda	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10	100000000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Samarinda	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10 Orang	100.000.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi		7,2	2.465.500.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi		5,6	2.465.500.000
Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan		9	1.600.000.000	Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan			1.600.000.000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Samarinda	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	35	200.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Samarinda	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	35 Lembaga	200.000.000
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5	100.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Samarinda	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	100.000.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	144	1.300.000.000	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	144 Orang	1.300.000.000
Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan		3	150.000.000	Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan			150.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Samarinda	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	30	150.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Samarinda	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	30 Lembaga	150.000.000
Keg. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap		10	300.000.000	Keg. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap			300.000.000
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30	300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	300.000.000
Keg. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina		20	165.500.000	Keg. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina			165.500.000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	165.500.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Samarinda	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	165.500.000

Keg. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah		7	250000000	Keg. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah		250.000.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7	250000000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen 250.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja terdaftar Yang di Tempatkan	17	900000000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja terdaftar Yang di Tempatkan	16,5 900.000.000
Keg. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja		2100	450000000	Keg. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja		500.000.000
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30	500000000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang 500000000
Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0	0	Pelayanan Antar Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 500000000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500	1000000000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang 1000000000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	1500000000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 150.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	45	1500000000	Perluasan Kesempatan Kerja	Samarinda	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	45 1500000000
Keg. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun		550	4500000000	Keg. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun		400.000.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	500000000				
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000	1500000000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Samarinda	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 150.000.000

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

Job Fair/ Bursa Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	175	250000000	Job Fair/ Bursa Kerja	Samarinda	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	175	250000000
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Samarinda	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	0	0	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia	Samarinda	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	-	0
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Samarinda	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	0	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Samarinda	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	-	0
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Samarinda	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	0	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Samarinda	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	-	0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		92	4950000000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		4.950.000.000
	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		92				Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		
Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		50	200000000	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama			200000000
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	40	100000000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Samarinda	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	100000000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	4	100000000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Samarinda	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	100000000

Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani		115	4750000000	Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani		4.750.000.000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perselisihan yang dicegah	150	2500000000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perselisihan yang dicegah	150 Perkara 2500000000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	115	1900000000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	115 Perkara 1900000000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Samarinda	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	10	500000000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Samarinda	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja 500000000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	2500000000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Samarinda	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga 2500000000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Samarinda	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19200	4010000000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Samarinda	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19200 4.010.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Tidak terdapat usulan masyarakat maupun proposal permintaan kegiatan dari masyarakat ke Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kota Samarinda

Dinas Tenaga Kerja

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	Kota Samarinda			
	1. Mengurangi Tingkat Pengangguran	Jl. Setia Kawan			Validasi Mitra Bapperida
	2. Pembinaan Usaha Kemasyarakatan	Jl. Cipto Mangunkusumo			Validasi Mitra Bapperida
	3. Pelatihan Industri Kecil	Jl. A.W. Syahrani Perum Guru SD			Validasi Mitra Bapperida
	4. Pelatihan Kursus Konten Kreator	Jl. A.W. Syahrani Perum Guru SD			Validasi Mitra Bapperida
	5. Pelatihan Keterampilan Kerja	Jl. Anang Hasyim			Validasi Mitra Bapperida
	6. Pelatihan UMKM	Jl. Anang Hasyim			Validasi Mitra Bapperida
	7. Pelatihan UMKM	Jl. Juanda 8			Validasi Mitra Bapperida
	8. Pelatihan Keterampilan Kerja	Jl. Juanda 8			Validasi Mitra Bapperida
	9. Pelatihan Tenaga Kerja	Jl. Pembangunan			Validasi Mitra Bapperida
	10. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Posyandu dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak secara berkelanjutan	Jl. Dr. Sutomo			Pengajuan Usulan
	11. Pelatihan Kader dalam rangka penguatan integritas layanan primer	Jl. Dr. Sutomo			Pengajuan Usulan

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2027 merupakan **tahun ketiga** dalam pelaksanaan **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029** di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Secara teknis, tahun ini adalah fase akselerasi di mana fondasi yang dibangun pada 2025-2026 mulai dipacu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir periode. Berikut adalah telaahan mendalam terhadap fokus kebijakan tersebut:

1. Transformasi Ekonomi: Menuju Pertumbuhan Tinggi

Kebijakan ekonomi 2027 akan berfokus pada transisi dari ekonomi berbasis komoditas ke ekonomi bernilai tambah tinggi.

- **Hilirisasi Total:** Perluasan hilirisasi tidak lagi terbatas pada nikel, tetapi merambah ke bauksit, tembaga, hingga produk agromaritim (rumput laut, kelapa, sawit).
- **Ketahanan Pangan & Energi:** Akselerasi swasembada pangan melalui intensifikasi lahan dan teknologi pertanian. Di sektor energi, 2027 menjadi tahun krusial bagi implementasi kebijakan **B50** (biodiesel 50%) dan peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
- **Ekonomi Digital & Hijau:** Penguatan infrastruktur digital di daerah 3T dan implementasi pajak karbon guna mendukung target *Net Zero Emission*.

2. Pembangunan SDM: Kualitas dan Produktivitas

Sesuai dengan visi "Asta Cita", investasi pada manusia menjadi prioritas utama untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*Middle-Income Trap*).

- **Makan Bergizi Gratis (MBG):** Pada 2027, program ini diharapkan telah mencapai cakupan nasional yang stabil, berfungsi sebagai stimulus ekonomi lokal bagi UMKM penyedia bahan pangan.

- **Reformasi Pendidikan & Kesehatan:** Fokus pada revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi (link and match dengan industri hilirisasi), serta penurunan angka *stunting* yang ditargetkan mencapai angka satu digit.

3. Infrastruktur dan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

- **Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN):** Fokus pada konektivitas logistik (jalan tol, pelabuhan, bandara) untuk menurunkan biaya logistik nasional yang masih tinggi.
- **Pembangunan dari Desa:** Optimalisasi Dana Desa untuk menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan pengembangan BUMDes.

4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tahun 2027 diproyeksikan menjadi tonggak digitalisasi pemerintahan.

- **Satu Jenis Paspor & Identitas Digital:** Target integrasi data kependudukan yang lebih solid (IKD) untuk mempermudah akses layanan publik dan jaminan sosial agar lebih tepat sasaran.
- **Pemberantasan Korupsi:** Penekanan pada sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-katalog) untuk meminimalkan kebocoran anggaran.

Pada tahun 2027, Disnaker Samarinda akan berada pada fase krusial implementasi **Rencana Tenaga Kerja Manajerial Daerah (RTKMD) 2025–2029**. Kebijakan ini merupakan turunan langsung dari visi nasional untuk menciptakan SDM tangguh dalam menyongsong dampak Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transformasi ekonomi daerah.

Berikut adalah telaahan strategis untuk tahun 2027:

1. Fokus Utama: Penguatan SDM Menuju IKN

Tahun 2027 diprediksi sebagai puncak migrasi dan operasional awal IKN secara masif. Samarinda, sebagai kota penyangga utama, akan memfokuskan kebijakan pada: **Upskilling dan Reskilling**: Pelatihan tidak lagi hanya bersifat dasar, tetapi berbasis **sertifikasi kompetensi** tinggi di sektor konstruksi, digital (desain grafis, IT), dan industri perkapalan.

- **Target Lulusan SMA/SMK**: Karena angka pengangguran Samarinda didominasi lulusan menengah, Disnaker akan memperkuat program *link and match* dengan industri melalui **Magang Hub** dan kemitraan dengan BPVP Samarinda.

2. Implementasi Regulasi Baru (Pasca-Revisi Perda)

Pada 2027, revisi **Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan** (yang digarap pada 2025-2026) seharusnya sudah berlaku penuh. Fokusnya meliputi:

- **Prioritas Tenaga Kerja Lokal**: Kebijakan afirmatif yang mewajibkan perusahaan di Samarinda menyerap persentase tertentu tenaga kerja lokal yang telah tersertifikasi.
- **Perlindungan Pekerja Sektor Konstruksi**: Adanya dana jaminan dari pengusaha untuk melindungi pekerja jika terjadi proyek mangkrak atau wanprestasi.
- **Inklusi Disabilitas**: Penegakan aturan kuota kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta dan pemerintah.

3. Transformasi Digital Layanan (Samarinda Smart City)

Sesuai dengan arah kebijakan *Satu Data Ketenagakerjaan*:

- **Aplikasi Integrasi**: Optimalisasi platform digital untuk memetakan profil pencari kerja secara *real-time* sehingga perusahaan dapat mencari tenaga kerja sesuai kompetensi tanpa melalui birokrasi yang panjang.
- **Bursa Kerja Digital (E-Job Fair)**: Pelaksanaan *Job Fair* yang lebih rutin secara hibrida, menghubungkan UMKM lokal dengan pencari kerja di tingkat kelurahan melalui dukungan Probebaya.

4. Pergeseran Kewenangan Pengawasan

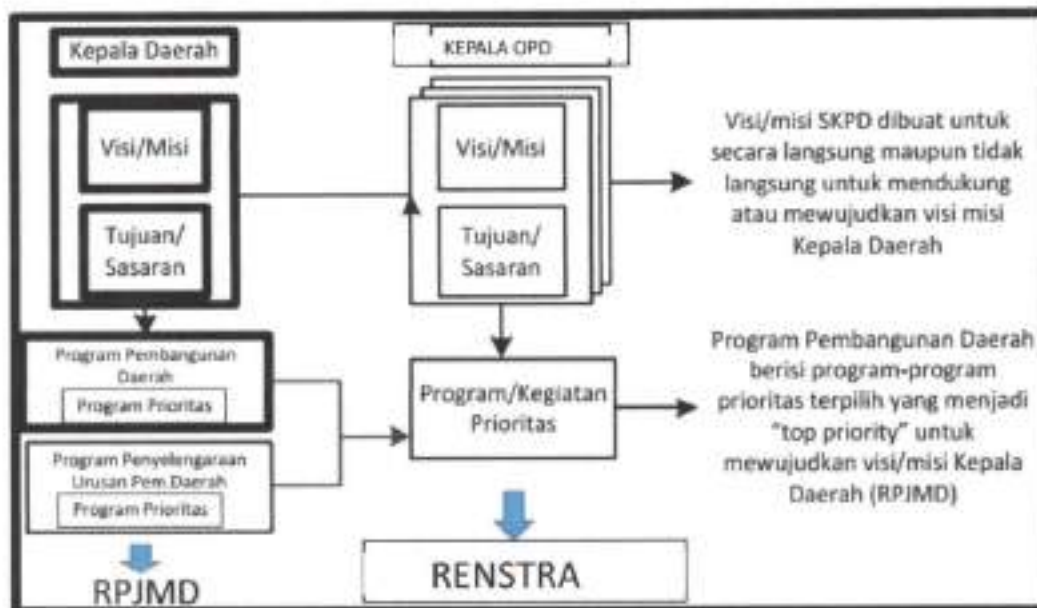
Penting untuk dicatat bahwa per 2027, fungsi **pengawasan ketenagakerjaan** sudah sepenuhnya berada di tingkat Provinsi (Disnakertrans Kaltim). Disnaker Kota Samarinda akan bertransformasi lebih sebagai:

- **Lembaga Fasilitator:** Fokus pada penempatan, pelatihan, dan hubungan industrial (mediasi sengketa tingkat awal).
- **Pemberdayaan Wirausaha Baru:** Menciptakan tenaga kerja mandiri melalui pelatihan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal.

**Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
Dengan Misi Kota Samarinda**

Misi Kota	Tujuan	Sasaran	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan	Berkurangnya Pengangguran	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Pencari Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja terdaftar Yang di Tempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Kasus Peselisihan yang terselesaikan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial
			Jumlah Pekerja Rentan yang diberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	

Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kota Samarinda dengan RENSTRA OPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini :



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

Renja Dinas Tenaga Kerja Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi misi. Adapun visi misi Walikota Terpilih adalah sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah

"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"
-Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul-

Tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dirumuskan untuk mendukung pencapaian Misi Kedua RPJMD, yaitu: "**Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan**". Selaras dengan hal tersebut, Sasaran Pembangunan Daerah yang menjadi turunan dari misi kedua tersebut adalah: "**Berkurangnya Kemiskinan dan Pengangguran**". Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, arah kebijakan RPJMD Kota Samarinda menetapkan strategi pembangunan melalui: "**Menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui Penyediaan Tenaga Kerja dengan Talenta dan Terampil**"

Berdasarkan arah kebijakan dan peran Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung pengurangan pengangguran, maka Tujuan Pembangunan Sektor Tenaga Kerja yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: "Berkurangnya Pengangguran" dimaksudkan sebagai arah kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan selama periode 2025–2029. Peningkatan kualitas ini diarahkan melalui penguatan kompetensi, keterampilan, dan etos kerja angkatan kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Upaya ini juga mencakup perluasan akses terhadap pelatihan kerja berbasis standar Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

kompetensi, sertifikasi profesi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA	TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK)

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA	TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK)	94.5	95	95.5	96	96.5

Tingkat kesempatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang produktif. Peningkatan indikator ini mencerminkan efektivitas program pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan kerja, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Dalam Renstra 2025–2029, indikator ini menjadi tolok ukur utama bagi pencapaian tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya serap tenaga kerja lokal.

sasaran pembangunan yang lebih terfokus, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun. Meningkatnya kesempatan kerja merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam periode Renstra 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya angkatan kerja usia produktif, terhadap peluang kerja yang layak dan berkelanjutan. Upaya pencapaian sasaran ini difokuskan pada perluasan jaringan penempatan tenaga kerja, peningkatan kapasitas pencari kerja melalui Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

pelatihan berbasis kompetensi, serta fasilitasi kewirausahaan dan penciptaan wirausaha baru. Melalui sasaran ini, diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah .

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dan mampu mendukung terwujudnya visi dan misi dari Kota Samarinda.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. *MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SAMARINDA YANG UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAHING.*
2. *MEWUJUDKAN EKONOMI SAMARINDA YANG INKLUSIF, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN.*
3. *MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN.*
4. MEWUJUDKAN SAMARINDA AYAK HUNI MELALUI STABILITAS KAMTIBMAS, KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGIS.
5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF, RESPONSIF, DAN ADAPTIF YANG BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL..

Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Samarinda adalah:

1. Melanjutkan dan menuntaskan **PROBEBAYA** sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT.
2. Melanjutkan dan meningkatkan program **pengendalian banjir**.
3. Melanjutkan dan menuntaskan Program Social Security Number.
4. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

5. Melanjutkan dan menuntaskan **pembangunan RTH berbasis Kelurahan.**
6. Melanjutkan dan menuntaskan **penataan Tepian Mahakam.**

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda akan difokuskan pada upaya Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan (Misi 2)

Oleh Karena itu upaya perwujudan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam tahun 2025-2029 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja.

Tujuan pertama adalah terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja merupakan penjabaran dari misi pertama Membangun daya saing tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten melalui pelatihan tenaga kerja, pemagangan dan pengembangan produktivitas. Serta misi kedua Membangun Kelembagaan Pelatihan yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terlaksananya Program Pelatihan dan Pemagangan berbasis Kompetensi serta Pembinaan terhadap Lembaga Latihan Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Tujuan Kedua, Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja untuk mengisi kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran merupakan penjabaran dari misi ketiga Mendorong peningkatan keterampilan, kompetensi dan kemandirian Angkatan kerja dalam rangka pemenuhan lowongan kerja dan peningkatan lapangan

kerja serta pengurangan pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja diperusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tujuan Ketiga, Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dan dilaksanakannya syarat kerja diperusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja merupakan penjabaran dari misi ketiga Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan dan penegakan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja, penyelesaian kasus-kasus PHI dan PHK antara pekerja/buruh dan perusahaan.
4. Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program.

Tujuan Keempat, Terlaksananya kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program merupakan penjabaran dari misi kelima Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Tersedia Informasi Data yang Akurat Untuk Perencanaan Tenaga Kerja Yang Matang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan bagian kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran, hampir sama dengan sasaran, Program juga bersifat spesifik, terstruktur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tahun 2027 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- ❖ **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ❖ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

❖ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

❖ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

❖ Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

❖ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

❖ Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

❖ Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

❖ Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- ❖ **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- ❖ **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- ❖ **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- ❖ **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel T-C.33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2027

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YAANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.141.186.000,00				18.330.443.000,00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89	9.725.686.000,00	PAD			9.653.498.000,00
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat daerah		81		PAD			
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP		100%	225.000.000,00	PAD			225.000.000,00
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	7	100.000.000,00	PAD		7	100.000.000,00
	2.07.07.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	3	75.000.000,00	PAD		3	75.000.000,00
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	4	50.000.000,00	PAD		4	50.000.000,00

2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100%	7.485.686.000,00				7.485.686.000,00
2.07.01.2.02.0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji/ dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	45 Orang/ Bulan	6.435.686.000,00	PAD		45	6.435.686.000,00
2.07.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	14 Dokumen	1.000.000.000,00	PAD		14	1.000.000.000,00
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	1 Laporan	50.000.000,00	PAD		1	50.000.000,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu		100%	150.000.000,00				100.000.000,00
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	40 Paket	50.000.000,00	PAD		-	-
2.07.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	8 Orang	50.000.000,00	PAD		8	50.000.000,00
2.07.01.2.02.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	8 Orang	50.000.000,00	PAD		8	50.000.000,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.000.000,00				327.812.000,00
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	3 paket	30.000.000,00	PAD		3	30.000.000,00
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	25.000.000,00	PAD		5	27.812.000,00
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Samarinda	1 paket	35.000.000,00	PAD		1	35.000.000,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	30.000.000,00	PAD		5	30.000.000,00

2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	30.000.000,00	PAD		5	30.000.000,00
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Samarinda	600 Dokumen	20.000.000,00	PAD		600	20.000.000,00
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	15 Laporan	35.000.000,00	PAD		15	35.000.000,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	7 Laporan	75.000.000,00	PAD		8	85.000.000,00
2.07.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	Kota Samarinda	100 Dokumen	20.000.000,00	PAD		100	20.000.000,00
2.07.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	30 Dokumen	15.000.000,00	PAD		30	15.000.000,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100%1	50.000.000,00				-
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	50.000.000,00	PAD		-	-
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP		100%	1.110.000.000,00				1.110.000.000,00
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	10.000.000,00	PAD		12	10.000.000,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	850.000.000,00	PAD		36	850.000.000,00
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	18 Laporan	50.000.000,00	PAD		18	50.000.000,00

	2.07.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	4 Laporan	200.000.000,00	PAD		4	200.000.000,00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	390.000.000,00				405.000.000,00
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	20 Unit	190.000.000,00	PAD		20	190.000.000,00
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 Unit	50.000.000,00	PAD		2	50.000.000,00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda	4 Unit	50.000.000,00	PAD		4	60.000.000,00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	70.000.000,00	PAD		1	75.000.000,00
	2.07.01.2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Samarinda	7 Unit	30.000.000,00	PAD		7	30.000.000,00
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		71,43	100.000.000,00				100.000.000,00
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi		2 Dokumen	100.000.000,00				100.000.000,00
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	Kota Samarinda	10 Orang	100.000.000,00	PAD		10	100.000.000,00
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi		7,20%	2.465.500.000,00				2.569.575.000,00
	2.07.03.2.01	Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan		9 Paket	1.600.000.000,00				1.719.575.000,00

2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	Kota Samarinda	35 Lembaga	200.000.000,00	PAD		35	200.000.000,00
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Samarinda	5 Unit	100.000.000,00	PAD		-	-
2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kota Samarinda	144 Orang	1.300.000.000,00	PAD		176	1.519.575.000,00
2.07.03.2.02	Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan		3 Kegiatan	150.000.000,00				150.000.000,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Kota Samarinda	30 Lembaga	150.000.000,00	PAD		30	150.000.000,00
2.07.03.2.03	Keg. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap		10 LPK	300.000.000,00				300.000.000,00
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Samarinda	30 Perizinan	300.000.000,00	PAD		30	300.000.000,00
2.07.03.2.04	Keg. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina		20 Perusahaan	165.500.000,00				150.000.000,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Samarinda	20 Perusahaan	165.500.000,00	PAD		20	150.000.000,00
2.07.03.2.05	Keg. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah		7 Dokumen	250.000.000,00				250.000.000,00
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Samarinda	7 Dokumen	250.000.000,00	PAD		7	250.000.000,00

4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja terdaftar Yang di Tempatkan		17	900.000.000,00			929.905.000,00
	2.07.04.2.01	Keg. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja		2100 Orang	500.000.000,00			529.905.000,00
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Samarinda	30 Orang	50.000.000,00	PAD	30	60.000.000,00
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Samarinda	60	50.000.000,00	PAD	-	60.000.000,00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Samarinda	500 Orang	100.000.000,00	PAD	500	100.000.000,00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Samarinda	20 Orang	150.000.000,00	PAD	25	154.905.000,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Samarinda	45 Orang/ Bulan	150.000.000,00	PAD	55	155.000.000,00
	2.07.04.2.03	Keg. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun		500 Dokumen	400.000.000,00			400.000.000,00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Samarinda	2000 Orang	150.000.000,00	PAD	2000	125.000.000,00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Samarinda	175 Orang	250.000.000,00	PAD	200	275.000.000,00
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		92%	4.950.000.000,00			5.077.465.000,00
			Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		92%				

2.07.05.2.01	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		50 Perusahaan	200.000.000,00				200.000.000,00
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Kota Samarinda	40 Perusahaan	100.000.000,00	PAD		40	100.000.000,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	Kota Samarinda	4 Laporan	100.000.000,00	PAD		4	100.000.000,00
2.07.05.2.02	Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani		115 Perkara	4.750.000.000,00				4.877.465.000,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Samarinda	150 Perkara	250.000.000,00	PAD		150	250.000.000,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	Kota Samarinda	115 Perkara	190.000.000,00	PAD		115	190.000.000,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kota Samarinda	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	PAD		10	50.000.000,00

	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Samarinda	1 Lembaga	250.000.000,00	PAD		1	250.000.000,00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Samarinda	19200	4.010.000.000,00	PAD		19500	4.137.465.000,00

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja

Program merupakan bagian kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran, hampir sama dengan sasaran, Program juga bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam periode tahun 2027 yang akan datang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027			
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YAANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.141.186.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
-1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.725.686.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				225.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	7	100.000.000,00	PAD
	2.07.07.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	3	75.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	4	50.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.485.686.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji/ dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	45 Orang/ Bulan	6.435.686.000,00	PAD
	2.07.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	14 Dokumen	1.000.000.000,00	PAD

2.07.01.2.07.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	1	50.000.000,00	PAD
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda	40 Paket	50.000.000,00	PAD
2.07.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda	8 Orang	50.000.000,00	PAD
2.07.01.2.02.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	8 Orang	50.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.000.000,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	3 paket	30.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	25.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Samarinda	1 paket	35.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	5	30.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda	5 Paket	30.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Samarinda	600 Dokumen	20.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	15 Laporan	35.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	7 Laporan	75.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	Kota Samarinda	100 Dokumen	20.000.000,00	PAD
2.07.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Samarinda	30 Dokumen	15.000.000,00	PAD
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00	
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Samarinda	1 Unit	50.000.000,00	PAD
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.110.000.000,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Kota Samarinda	12 Laporan	10.000.000,00	PAD

	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Samarinda	36 Laporan	850.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	18 Laporan	50.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Samarinda	4 Laporan	200.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				390.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	20 Unit	190.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Kota Samarinda	2 Unit	50.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda	4 Unit	50.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Samarinda	1 Unit	70.000.000,00	PAD
	2.07.01.2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Samarinda	7 Unit	30.000.000,00	PAD
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	Kota Samarinda	10 Orang	100.000.000,00	PAD
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.465.500.000,00	
	2.07.03.2.01	Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi				1.600.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	Kota Samarinda	35 Lembaga	200.000.000,00	PAD
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Samarinda	5 Unit	100.000.000,00	PAD
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kota Samarinda	144 Orang	1.300.000.000,00	PAD
	2.07.03.2.02	Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				150.000.000,00	

	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Kota Samarinda	30 Lembaga	150.000.000,00	PAD
	2.07.03.2.03	Keg. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				300.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Samarinda	30 Perizinan	300.000.000,00	PAD
	2.07.03.2.04	Keg. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil				165.500.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Samarinda	20 Perusahaan	165.500.000,00	PAD
	2.07.03.2.05	Keg. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				250.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saling Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Samarinda	7 Dokumen	250.000.000,00	PAD
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			16,5	900.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Keg. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja			500.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Samarinda	30 Orang	50.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Samarinda	60	50.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Samarinda	500 Orang	100.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Samarinda	20	150.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Samarinda	45	150.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.03	Keg. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				400.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Samarinda	2000	150.000.000,00	PAD
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Samarinda	175	250.000.000,00	PAD
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				4.950.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				200.000.000,00	

2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WUKP Online	Kota Samarinda	40 Perusahaan	100.000.000,00	PAD
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Samarinda	4 Laporan	100.000.000,00	PAD
2.07.05.2.02	Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota				4.750.000.000,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Samarinda	150 Perkara	250.000.000,00	PAD
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	Kota Samarinda	115 Perkara	190.000.000,00	PAD
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Kenaggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kota Samarinda	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	PAD
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Samarinda	1 Lembaga	250.000.000,00	PAD
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Samarinda	19200	4.010.000.000,00	PAD

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mendeskripsikan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sebagai wujud nyata dari pelaksanaan program-program yang sesuai Visi Misi dan Program Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pelaksanaan program kerja mengacu pada tuntutan paradigma baru yang harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan kepada Masyarakat luas.

Ranwal renja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2027 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Diharapkan Ranwal Renja juga menjadi dasar yang kompeten dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pemutus kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang optimal.

Samarinda, Januari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja



HI. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP, MH
Pembina TK.I IV/b
NIP. 19751212 199501 2 001